

BAB II.

BAHAYA HOAKS DALAM KOMUNIKASI YANG MENGHAMBAT LAJU VAKSINASI

Teknologi menjadi salah satu kunci yang menyokong kehidupan modern. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi memudahkan distribusi informasi serta memungkinkan percakapan terjalin tanpa adanya batas-batas geografis. Media baru merupakan salah satu produk teknologi dalam bentuk digitalisasi informasi yang mengandalkan penggunaan perangkat elektronik seperti komputer dan internet. Melalui survei yang dilakukan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), diketahui terdapat peningkatan pengguna internet di Indonesia selama masa pandemi hingga mencapai 220 juta pengguna (Zuraya, 2022), hal ini disebabkan naiknya kebutuhan komunikasi serta pemenuhan informasi masyarakat akibat keterbatasan yang diciptakan oleh situasi pandemi. Penggunaan internet sebagai salah satu bentuk dari media baru sangatlah berjasa karena dapat membantu masyarakat untuk bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sekolah, bekerja, berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain tanpa tatap muka. Namun selain terjadinya kenaikan penggunaan internet selama kondisi pandemi COVID-19, diketahui juga melalui laman resmi kominfo, terdapat kenaikan konten berita hoaks seputar COVID-19 di media sosial hingga mencapai 5.829 konten, 1.979 konten diantaranya merupakan berita hoaks yang membahas tentang vaksinasi COVID-19 (Rizkinaswara, 2022).

Hoaks didefinisikan sebagai informasi sesat yang membahayakan karena disampaikan seolah-olah merupakan kebenaran sehingga dapat menyesatkan persepsi individu yang membacanya (Simarmata et al., 2020, p. 34). Hoaks dapat berupa disinformasi, minsinformasi serta malinformasi dimana disinformasi merupakan informasi bohong yang dengan sengaja diciptakan dengan maksud untuk membahayakan pihak tertentu, sedangkan misinformasi merupakan penyebaran informasi bohong tanpa ada unsur untuk menyakiti atau membahayakan pihak tertentu dan malinformasi yang merupakan penyebaran informasi privat atau informasi yang tidak diperuntukkan sebagai konsumsi publik (Greifeneder et al., 2021, p. 10). Beberapa karakteristik dari hoaks adalah disebarakan kepada publik dengan tujuan untuk mengelabui pembacanya, menyangkut suatu isu sensitif seperti SARA, mencatut nama tokoh publik tertentu serta disebarakan secara berulang sehingga dipercaya sebagai suatu kebenaran (Jumanto, 2019, sec. 3.3 para 1). Hoaks dapat menimbulkan kebingungan serta ketakutan di antara masyarakat, meningkatkan keresahan dan kecemasan serta merusak citra atau kredibilitas dari pihak atau lembaga (Simarmata et al., 2020, p. 34), dalam konteks kesehatan, penyebaran hoaks menjadi lebih berbahaya karena dapat menimbulkan ketakutan berlebih, ketidakpercayaan terhadap penyedia layanan kesehatan, pencarian alternatif tindakan penyembuhan yang belum terbukti secara medis, penundaan atau penolakan keperluan pemeriksaan dan tindakan medis serta penundaan atau penolakan vaksinasi yang merupakan ancaman kesehatan global (P et al., 2021, p. 202).

Contoh nyata dari dampak penolakan upaya kesehatan akibat hoaks banyak terjadi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Melalui berita *feature* dengan judul *Hoaks Telah Membunuh Ayahku*, diketahui seorang penderita komorbid diabetes yang terpapar COVID-19 menolak obat-obatan terapi dan vaksinasi COVID-19 karena memiliki riwayat sering membaca tulisan menyesatkan tentang COVID yang bersumber dari media sosial dan *broadcast* grup aplikasi pertukaran pesan. Disebutkan juga, pada hari kedua dimana pasien tersebut dinyatakan positif COVID-19, pasien masih mengakses berita hoaks tentang pernyataan kontroversial dari dokter yang menyebutkan bahwa interaksi obat COVID-19 dapat menyebabkan kematian (Rahayu, 2021). Hal ini menjadi salah satu bukti bagaimana berita hoaks dapat memberikan andil dalam penolakan tindakan medis yang sebetulnya penting untuk dilakukan.



Gambar 2. 1. Konfirmasi Hoaks oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Sumber : www.instagram.com/dkkksemarang

Kehebohan karena berita hoaks juga terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Semarang adalah beredarnya video hoaks penyuntikan vaksin kosong di Sekolah Tunas Harum Bangsa Semarang, Jawa Tengah pada platform sosial media Instagram. Hoaks ini bermula karena adanya kesalahpahaman dimana ketika petugas vaksinasi sedang melakukan penyuntikan vaksin menemukan adanya sedikit darah sehingga menghentikan vaksinasi tersebut dan mencabut suntikan namun disalahpahami sebagai menyuntikkan vaksin kosong. Kejadian ini telah ditindaklanjuti dan diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang karena apabila dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dapat menggiring opini publik untuk tidak melakukan vaksinasi COVID-19



Gambar 2. 3. Konfirmasi Hoaks oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Sumber : www.instagram.com/dkksemarang

Contoh kasus lain yang juga terjadi di Kota Semarang adalah tersebarnya berita hoaks perekrutan tenaga vaksinator untuk vaksin booster COVID-19 dengan ketentuan minimal pendidikan D3/S1 tanpa adanya kejelasan persyaratan pendidikan kesehatan serta perekrutan staf kantor pelayanan kesehatan minimal SMA/SMK yang mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Semarang namun terbukti tidak benar dan juga telah diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Adanya hoaks yang menyangkut vaksin maupun pelayanan vaksinasi COVID-19 dikhawatirkan dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan vaksinasi, membuat masyarakat merasa takut dan menimbulkan keengganan untuk melakukan vaksinasi sehingga berakir dapat mengganggu laju penerimaan vaksin COVID-19.

Berita hoaks dapat disebarakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KIC (*Katadata Insight Center*) dan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), ditemukan bahwa 11,9 persen responden mengakui telah menyebarkan berita hoaks pada tahun 2021 (Jayani, 2022), di sisi lain, berita hoaks yang ditemukan pada platform digital seperti sosial media juga seringkali disebarakan tanpa adanya maksud untuk membahayakan pihak lain, hanya saja informasi yang diterima tersebut disebarakan secara terburu-buru kepada keluarga, rekan kerja, tetangga atau kelompok rujukan tanpa adanya konfirmasi atau pengecekan ulang. Berdasarkan penelitian oleh Kampersky, diketahui bahwa generasi Z (kelahiran tahun 1997-2009) merupakan generasi yang paling banyak membagikan berita dari media sosial tanpa adanya *re-*

checking atau verifikasi ulang dengan presentase sebesar 28 persen, diikuti dengan generasi X (kelahiran tahun 1965-1980) dengan presentase sebesar 21 persen kemudian diikuti kembali oleh generasi *baby boomers* (kelahiran 1946-1964) dengan presentase sebesar 19 persen (Pusparisa, 2021). Tindakan menyebarkan informasi tanpa adanya pengecekan ulang seringkali menyebabkan hoaks tidak terdeteksi dan ikut tersebar sehingga mudah untuk bertumbuh dengan pesat di kalangan masyarakat melalui jalur komunikasi eksklusif seperti grup *Whatsapp* keluarga dan pertukaran pesan di media sosial seperti Instagram atau *Twitter*.

Dalam menyerap dan membagikan informasi di internet, diperlukan kejelian untuk menemukan apakah informasi yang akan diserap atau dibagikan tersebut merupakan informasi yang kredibel atau tidak. Beberapa hal yang menjadi indikator dari informasi kredibel adalah akurat atau terbebas dari kesalahan, terkini, memiliki keseimbangan, dan tidak bias (Donaldson et al., 2014, p. 42). Untuk menemukan suatu informasi yang kredibel diperlukan beberapa tahapan pengecekan, yaitu dengan memeriksa sumber informasi, memeriksa misi dan pengelola laman dimana informasi tersebut ditemukan, memeriksa penulis dari informasi tersebut untuk mengetahui apakah penulis dari informasi tersebut terbukti nyata dan bisa dipercaya, memeriksa informasi pendukung atau daftar pustaka, dan memeriksa tanggal dimana informasi tersebut dipublikasikan atau ditulis. Beberapa hal-hal tambahan yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah menghindari segala hindari bias supaya tidak mempengaruhi penilaian terhadap informasi yang dibaca, membaca informasi hingga tuntas, dan tidak mempercayai judul yang seringkali

dilebih-lebihkan karena dapat berbeda dari inti keseluruhan informasi, memahami majas atau gaya penulisan dari informasi yang dibaca, dan terakhir bisa juga melakukan konfirmasi dengan menanyakan informasi yang diperoleh kepada pakar (Prabowo, 2020, p. 92).

Berita hoaks dapat ditekan persebarannya dengan melakukan upaya-upaya pemberantasan hoaks yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum. Dari segi pemerintah, Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) diketahui telah rutin melakukan penghapusan konten-konten hoaks dan melakukan pemutusan akses terhadap situs yang menyebarkan berita hoaks. selain itu banyak lembaga publik seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan Satuan Tugas COVID-19 yang telah menyediakan laman untuk melakukan pengecekan informasi baik terkait COVID-19 maupun informasi hoaks lain sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan konfirmasi apakah informasi yang diterima merupakan hoaks atau bukan. Masyarakat umum juga dapat ikut berkontribusi dengan tidak menyebarkan konten hoaks serta melakukan pengaduan terkait penemuan konten hoaks melalui laman turnbackhoaks.id.

Selain itu sebagai bentuk preventif sebelum berita hoaks tersebar, diperlukan peningkatan literasi digital bagi seluruh pengakses informasi. Literasi digital merupakan kecakapan individu dalam menemukan, mengevaluasi serta memanfaatkan informasi yang ditemukan melalui teknologi. Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh KIC (*Kata Data Insight Center*) pada tahun 2021,

diketahui bahwa Indonesia memiliki indeks literasi digital 3,49 atau tergolong pada kategori sedang, peningkatan literasi digital dapat dilakukan dengan membiasakan diri untuk berpikir kritis atau tidak semata-mata percaya terhadap informasi yang diterima, menguasai cara menemukan informasi yang kredibel, menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengasah diri dan memperkaya pengetahuan di berbagai bidang serta tidak secara sembarangan membagikan data pribadi di Internet (Kusnandar, 2022).